BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian dan pembahasan adalah tingkat kesehatan BPR Konvensional di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2011 sampai dengan 2015 yang diukur menggunakan pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa BPR Konvensional di Provinsi Kepulauan Riau merupakan BPR yang sehat bahkan dalam beberapa indikator menunjukkan bahwa BPR Konvensional di Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan predikat bank yang sangat sehat. Meskipun ada sebagian kabupaten kota yang masih meraih peringkat komposit “Tidak Sehat”, Namun tidak sampai mempengaruhi Aktivas berjalan nya operasional perbankan. Pelaksanaan faktor-faktor dalam penilaian kesehatan BPR Konvensional tersebut telah dilaksanakan dengan sangat baik sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Bank Indonesia, serta berjalan secara efektif dan efisien.

Pernyataan kesimpulan tersebut didukung dengan data-data sebagai berikut:

5.1.1. Risk Profile (Profil Risiko)

Berdasarkan faktor *Risk Profile* yang penilaiannya terdiri dari penilaian risiko kredit dengan menggunakan rasio LDR, NPL, dan BOPO

menggambarkan pengelolaan risiko kredit BPR yang telah dilaksanakan dengan baik, adapun nilai perkembangan LDR dari tahun 2011 sampai 2015 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.1. perkembangan LDR priode 2011 – 2015

NO	Kabupaten / Kota	LDR				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Bintan	55,29%	69,90%	61,04%	81,05%	82,71%
2	Karimun	76,50%	81,73%	79,09%	75,63%	75,47%
3	Lingga	69,17%	85,04%	86,41%	88,36%	89,16%
4	Natuna	0,00%	67,05%	77,30%	59,50%	74,06%
5	Batam	72,81%	78,23%	75,90%	77,82%	81,56%
6	Tanjung Pinang	56,72%	75,20%	72,59%	77,34%	69,67%

Perkembangan LDR disetiap Kabupaten kota dari tahun ketahun menunjukkan bahwa BPR mendapatkan predikat yang baik walaupun tidak sangat baik dan hal tersebut membuktikan bahwa BPR di Provinsi Kepulauan Riau memiliki profitabilitas yang baik terhadap pengembalian kembali dana pihak ketiga.

Tabel 5.2. perkembangan NPL priode 2011 – 2015

NO	Kabupaten / Kota	NPL				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Bintan	0,77%	0,87%	0,71%	1,78%	1,61%
2	Karimun	3,19%	5,86%	2,74%	2,14%	3,53%
3	Lingga	8,43%	12,25%	12,52%	6,82%	11,62%
4	Natuna	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,29%
5	Batam	1,93%	2,59%	2,56%	2,48%	2,73%
6	Tanjung Pinang	1,85%	1,26%	1,18%	2,12%	3,11%

NPL menggambarkan pengelolaan risiko kredit BPR yang telah dilaksanakan dengan baik, karena dapat dilihat mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015 NPL BPR Konvensional Provinsi Kepulauan Riau dari

setiap Kabupaten Kota mengalami penurunan walaupun masih ada yang mencapai angka dibawah 2 %. Namun hal tersebut masih membuat BPR Konvensional Provinsi Kepulauan Riau masih dalam kategori BPR yang sehat.

Tabel 5.3. perkembangan BOPO priode 2011 – 2015

NO	Kabupaten / Kota	BOPO				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Bintan	98,26%	69,64%	81,05%	81,45%	86,30%
2	Karimun	91,48%	75,41%	75,63%	77,14%	82,13%
3	Lingga	119,93%	100,23%	88,36%	100,31%	95,08%
4	Natuna	0,00%	245,71%	59,50%	57,41%	53,14%
5	Batam	80,85%	76,19%	77,82%	82,93%	79,35%
6	Tanjung Pinang	81,21%	78,18%	77,34%	79,29%	81,59%

Berdasarkan nilai BOPO yang dihasilkan dari tahun ketahun, dapat disimpulkan bahwa manajemen BPR konvensional di Provinsi Kepulauan Riau sangat mampu mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya. Hal ini terbukti dari setiap Kabupaten Kota secara keseluruhan dari tahun ketahun meraih Peringkat Komposit 1 dengan keterangan “sangat Sehat”

5.1.2. Earning (Rentabilitas)

Berdasarkan faktor Earnings atau rentabilias yang penilaiannya terdiri dari perhitungan rumus *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Adapun perkembangan nilai ROA dan ROE sepanjang tahun 2011 sampai 2015 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 5.4. perkembangan ROA priode 2011 – 2015

NO	Kabupaten / Kota	ROA				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Bintan	0,84%	0,59%	2,32%	2,24%	2,03%
2	Karimun	1,45%	3,69%	2,96%	2,74%	2,22%
3	Lingga	-3,24%	-0,03%	1,59%	-0,24%	0,32%
4	Natuna	0,00%	-9,13%	6,88%	6,39%	6,66%
5	Batam	2,72%	3,18%	2,53%	2,12%	2,80%
6	Tanjung Pinang	1,86%	2,73%	3,35%	3,14%	3,87%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan. Hal ini menandakan bahwa bertambahnya jumlah aset yang dimiliki oleh setiap Kabupaten Kota di Provinsi Kepridan diikuti dengan bertambahnya keuntungan yang didapat oleh setiap BPR.

Tabel 5.5. perkembangan ROE priode 2011 – 2015

NO	Kabupaten / Kota	ROE				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Bintan	19,84%	78,87%	83,45%	63,30%	67,52%
2	Karimun	22,19%	72,25%	86,39%	66,30%	52,61%
3	Lingga	-10,75%	-0,17%	9,85%	-1,32%	1,47%
4	Natuna	0,00%	-10,26%	15,31%	20,28%	26,30%
5	Batam	39,24%	47,68%	40,60%	36,87%	49,49%
6	Tanjung Pinang	36,67%	50,90%	42,81%	33,95%	28,11%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai ROE yang dihasilkan dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang artinya BPR

disetiap Kabupaten kota di Perovinsi Kepulauan Riau Mampu untuk mengelola modal yang di investasikan dengan sangat baik.

5.1.3. *Capital* (Permodalan)

Berdasarkan faktor Capital atau Permodalan yang penilaiannya menggunakan rumus Capital Adequacy Ratio (CAR), adapun perkembangan nilai perolehan rasio CAR sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 5.6. perkembangan CAR priode 2011 – 2015

NO	Kabupaten / Kota	CAR				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Bintan	17,58%	11,97%	17,91%	17,91%	17,31%
2	Karimun	11,78%	11,20%	10,67%	10,67%	11,41%
3	Lingga	31,65%	16,54%	17,10%	17,10%	20,81%
4	Natuna	0,00%	104,04%	56,18%	56,18%	47,42%
5	Batam	14,77%	14,53%	14,77%	14,77%	14,37%
6	Tanjung Pinang	15,66%	14,41%	16,63%	16,63%	19,47%

Dari perkembangan ratio CAR diatas dapat disimpulkan bahwa BPR Konvensional di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2011 sampai dengan 2015 memiliki rasio CAR yang sudah diatas ketentuan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa BPR Konvensional di Provinsi Kepulauan Riau mampu melakukan pengelolaan permodalan dengan sangat baik sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha perseroan, disamping hal tersebut BPR disetiap Kabupaten Kota juga memiliki tingkat kecukupan modal yang baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya dan dapat mengatasi kemungkinan terjadinya risiko.

5.2. SARAN

Adapun saran – saran dalam penelitian ini ialah sebagaio berikut:

1. Tingkat kesehatan suatu bank merupakan hal yang penting yang dapat membuat para stakeholders memberikan kepercayaan untuk menanamkan dananya ke dalam bank tersebut. Dalam rangka meningkatkan tingkat kesehatannya, disarankan BPR Konvensional Provinsi Kepulauan Riau khusus nya di setiap Kabupaten harus terus memperkuat kegiatan usahanya agar jumlah aset yang dimiliki semakin meningkat, jumlah penyaluran dana baik dalam bentuk kredit maupun penempatan di bank lain semakin meningkat, serta pendapatan operasional dan laba yang diperoleh untuk tahun tahun berikutnya semakin meningkat.
2. Berdasarkan analisis rasio-rasio pengukuran yang telah dilakukan kepada BPR konvensional provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2011-2015, terdapat rasio yang mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun – tahun tertentu. Hal ini perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat agar pada rasio-rasio tersebut terus mengalami peningkatan dan memiliki konsistensi untuk tahun-tahun berikutnya.
3. Mengingat Faktor *Good Corporate Governance* (GCG) tidak dipublish pada tingkat Provinsi dan hanya di publish di setiap masing – masing BPR , perlu di ingat bahwa Faktor *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah dilaksanakan dengan baik oleh setiap BPR di masing – masing Kabupaten kota, harus terus mempertahankan keadaan tersebut karena mulai dari tata kelola perusahaan yang baik akan berdampak baik kepada seluruh kegiatan

operasional yang lain. Hal ini dimaksudkan agar tahun-tahun berikutnya dapat mengurangi risiko yang akan dihadapi dan setiap BPR menjadi lebih baik dan lebih dipercaya oleh para stakeholders yang dimiliki oleh setiap BPR.

4. Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa metode RGEC tidak dapat diterapkan pada BPR sepenuhnya karena salah satu metode RGEC yaitu metode GCG tidak dapat diambil datanya pada BI karena datanya bersifat rahasia, sedangkan metode RGEC menuntut keterbukaan.